

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT DILIHAT DARI BERBAGAI PERSPEKTIF DAN RELEVANSINYA  
DALAM TANTANGAN GLOBALKana Indika Caturhmi<sup>1</sup>, Feirozia Salwa Faradisa<sup>2</sup>, Dedde Rachman Maulana<sup>3</sup>, Suryaningsi Suryaningsi<sup>4</sup>Email: [kanaindika26@gmail.com](mailto:kanaindika26@gmail.com), [fsalwafaradisa@gmail.com](mailto:fsalwafaradisa@gmail.com), [Ubakhdede@gmail.com](mailto:Ubakhdede@gmail.com),  
[suryaningsi@fkip.unmul.ac.id](mailto:suryaningsi@fkip.unmul.ac.id)

Universitas Mulawarman

**Abstrak**

Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan fondasi teologis dan moral bangsa Indonesia yang memiliki dimensi ontologis (hakikat keberadaan), epistemologis (sumber dan cara memperoleh pengetahuan), dan aksiologis (nilai dan tujuan hidup). Kajian ini bertujuan untuk menganalisis struktur Pancasila dalam kerangka filsafat serta menjelaskan keterkaitan antar-sila sebagai satu kesatuan sistem nilai yang integral. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, artikel ini menemukan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga membentuk pola pikir dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemahaman filosofis terhadap Pancasila penting untuk memperkuat identitas nasional dan menjawab tantangan globalisasi.

Kata kunci: Pancasila, Sistem Filsafat, Sistem Nilai, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi

**Abstract**

*Pancasila as a philosophical system is the ideological and moral foundation of the Indonesian nation which has ontological, epistemological, and axiological dimensions. This study aims to analyze the structure of Pancasila within a philosophical framework and explain the interrelationships between the principles as an integral value system. Through a qualitative approach based on literature studies, this article finds that Pancasila is not only the basis of the state, but also forms a pattern of thinking and behavior in social and state life. A philosophical understanding of Pancasila is important to strengthen national identity and answer the challenges of globalization.*

**Keywords:** Pancasila, Philosophical System, Value System, Ontology, Epistemology, Axiology

## Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## Pendahuluan

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, bukan hanya sekedar rumusan normatif, tetapi juga merupakan sistem filsafat yang mendalam. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila menawarkan kerangka berpikir yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Namun, dalam era globalisasi dan modernisasi, Pancasila menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang saling terkait. Ontologi Pancasila menekankan pada eksistensi Tuhan dan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki martabat. Epistemologi Pancasila mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman, akal, dan wahyu, yang semuanya harus diarahkan untuk kebaikan bersama. Aksiologi Pancasila menekankan pada nilai-nilai moral dan etika dalam setiap tindakan, yang mencakup keadilan, persatuan, dan kesejahteraan sosial.

Globalisasi membawa dampak positif dan negatif. Di satu sisi, globalisasi membuka akses informasi dan teknologi yang luas. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa masuk nilai-nilai asing yang dapat mengikis nilai-nilai lokal, termasuk Pancasila. Sikap individualisme yang berkembang pesat dalam masyarakat modern sering kali bertentangan dengan nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang diajarkan oleh Pancasila. Munculnya paham-paham radikal dan intoleran menjadi tantangan serius bagi Pancasila. Menurut (Suryaninggi, S., dkk., 2016) Pancasila, dengan nilai-nilai toleransi dan moderasi, harus menjadi benteng dalam menghadapi paham-paham yang dapat merusak kerukunan antar umat beragama dan antar warga negara.

Krisis lingkungan global memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Pancasila, dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan, dapat menjadi landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada kesejahteraan bersama dan keberlanjutan lingkungan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Pancasila tetap relevan sebagai sistem filsafat dalam menghadapi dinamika global. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi dalam merespons tantangan-tantangan tersebut. Pancasila mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama, antara kemajuan teknologi dan pelestarian lingkungan, serta antara kebebasan beragama dan toleransi antarumat beragama.

Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki kedalaman dan keluwesan dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Pancasila dapat menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan global, seperti globalisasi, radikalisme, dan krisis lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara Indonesia untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar dapat mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan beradab di tengah dinamika global. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang tidak hanya bersifat yuridis-konstitusional, tetapi juga filosofis. Dalam kerangka pemikiran filsafat, Pancasila mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menyeluruh dan integral, mencakup aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis (Hidayat, 2021). Pancasila sebagai sistem filsafat menyiratkan bahwa kelima silanya bukan sekedar kumpulan nilai-nilai moral, melainkan suatu struktur pemikiran yang saling terkait, logis, dan mendalam.

Sebagai sistem, Pancasila tidak dapat dipahami secara terpisah-pisah antar silanya. Tiap sila saling mendasari dan melengkapi, membentuk satu kesatuan nilai yang mencerminkan realitas, sumber pengetahuan, dan tujuan hidup masyarakat Indonesia (Lestari & Maulana, 2022). Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, tidak hanya menjadi sila pertama secara urutan, tetapi juga fondasi ontologis yang menopang sila-sila lainnya. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, keberadaan Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi semakin penting. Pancasila harus mampu menjadi filter ideologis serta sumber nilai dalam pengambilan kebijakan, pendidikan, dan pembentukan karakter bangsa (Yuliana, 2025). Sayangnya, pemahaman masyarakat terhadap Pancasila seringkali masih terbatas pada aspek normatif dan belum menyentuh kedalaman filsafatnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji Pancasila sebagai sistem filsafat secara lebih mendalam, dengan menelaah struktur hubungan antar-sila dan maknanya

dari perspektif filsafat. Kajian ini penting untuk memperkuat landasan ideologis bangsa dalam menghadapi tantangan zaman, serta mendorong internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Fokus utama penelitian adalah menganalisis Pancasila sebagai sistem filsafat melalui pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh dari sumber-sumber sekunder yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, prosiding ilmiah, dan karya akademik lainnya. Analisis dilakukan dengan menelaah isi dan struktur lima sila Pancasila dalam kerangka tiga cabang utama filsafat, yaitu ontologi (hakikat keberadaan), epistemologi (sumber dan cara memperoleh pengetahuan), dan aksiologi (nilai dan tujuan hidup). Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi keterkaitan logis antar sila serta untuk memahami makna filosofis yang membentuk Pancasila sebagai sistem nilai yang menyeluruh dan integral (Siregar, 2023; Wibowo, 2024).

## Pembahasan

### A. Pancasila Sebagai Suatu Sistem Filsafat.

Sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila bukanlah kumpulan nilai yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebuah struktur yang integral dan organis. Kelima silanya saling berkaitan dan membentuk kesatuan yang utuh, di mana satu sila tidak dapat dilepaskan dari sila lainnya tanpa merusak makna keseluruhan. Dalam sistem ini, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa berperan sebagai dasar ontologis, yaitu fondasi dari seluruh keberadaan dan nilai dalam Pancasila. Artinya, keberadaan nilai-nilai lainnya dalam sila kedua hingga kelima bersumber dan berakar pada pengakuan terhadap hakikat Ketuhanan (Hidayat, 2021).

Sila kedua hingga kelima kemudian menjadi penjabaran konkret dari nilai Ketuhanan tersebut dalam ranah kemanusiaan, sosial, politik, dan ekonomi. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Persatuan Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman bangsa harus disatukan dalam semangat keimanan dan kemanusiaan. Sementara itu, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan bentuk implementasi nilai-nilai etis dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hubungan antar-sila dalam Pancasila bersifat organis, bukan mekanis. Maksudnya, sila-sila tersebut tidak dapat diurutkan secara lepas dan kaku, melainkan saling melengkapi dan menopang satu sama lain dalam suatu dinamika yang harmonis. Jika satu sila diabaikan atau ditinggalkan, maka keseimbangan sistem Pancasila akan terganggu. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem filsafat tidak hanya memberi kerangka normatif, tetapi juga kerangka berpikir, bertindak, dan bermasyarakat yang khas Indonesia. Sistem ini mengintegrasikan dimensi ontologis (keberadaan), epistemologis (pengetahuan), dan aksiologis (nilai), sehingga menjadikannya landasan filsafat yang hidup, dinamis, dan kontekstual dalam menjawab tantangan zaman.

Secara ontologis, Pancasila memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral. Pandangan ini tidak bersifat parsial atau materialistik, melainkan holistik, karena melihat manusia sebagai satu kesatuan yang utuh antara tubuh, jiwa, dan akal budi. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan bahwa sumber dari segala keberadaan termasuk manusia dan alam semesta berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, manusia memiliki nilai dan martabat yang melekat karena kedudukannya sebagai ciptaan Tuhan, bukan semata-mata karena fungsi sosialnya (Lestari & Maulana, 2022).

Sila-sila berikutnya dalam Pancasila merupakan penjabaran dari hakikat manusia tersebut. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memperkuat pandangan bahwa manusia memiliki martabat yang harus dihormati tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hanya dapat hidup dan berkembang melalui kebersamaan dan solidaritas. Selanjutnya, sila keempat dan kelima, yang berkaitan dengan demokrasi dan keadilan sosial, menggambarkan bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral dan etika dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Dengan demikian, Pancasila secara ontologis tidak hanya memberikan gambaran tentang apa itu manusia, tetapi juga bagaimana manusia seharusnya hidup. Pancasila menolak pandangan yang memisahkan aspek spiritual dan sosial manusia. Sebaliknya, ia mengintegrasikan keduanya dalam suatu sistem nilai yang berakar pada kenyataan tertinggi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Pandangan ini menciptakan dasar yang kuat bagi bangunan etika sosial, hukum, dan politik di Indonesia, yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, individu dan kolektif, serta kebebasan dan tanggung jawab.

Dalam hal epistemologi, Pancasila mencerminkan cara berpikir yang khas dan unik dari bangsa Indonesia, yang tidak terlepas dari kekayaan nilai budaya, agama, dan pengalaman historis kolektif. Pancasila tidak hanya mengandalkan rasionalitas sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi juga mengakui intuisi, wahyu, pengalaman hidup, dan nilai-nilai luhur sebagai bagian sah dari proses memperoleh dan memvalidasi kebenaran. Hal ini menciptakan suatu pandangan epistemologis yang integral dan menyeluruh, berbeda dengan epistemologi Barat yang cenderung dualistik, objektif, dan rasionalistik semata (Siregar, 2023).

Pengetahuan dalam kerangka Pancasila tidak dipisahkan dari nilai dan moral. Artinya, kebenaran tidak hanya diukur melalui logika atau metode ilmiah yang ketat, tetapi juga melalui keselarasan dengan nilai kemanusiaan dan kearifan lokal. Misalnya, dalam pengambilan keputusan politik atau sosial, musyawarah (yang merupakan pengejawantahan sila keempat) menjadi metode epistemologis khas yang mencerminkan pentingnya kebijaksanaan kolektif sebagai sumber pengetahuan. Lebih jauh, epistemologi Pancasila bersifat kontekstual, yaitu memperhitungkan kondisi sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi kerangka berpikir akademis, tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam memahami persoalan hidup sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila mengusulkan model pengetahuan yang tidak terasing dari realitas manusia, tetapi justru berpijak pada pengalaman hidup dan nilai-nilai yang telah teruji secara sosial dan historis.

Dalam konteks global, pendekatan epistemologis Pancasila ini menawarkan alternatif terhadap dominasi pendekatan positivistik Barat. Ia mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan sejati harus memperhatikan dimensi etis dan spiritual, serta menghargai pluralitas perspektif dalam mencapai kebenaran. Maka, Pancasila sebagai sistem filsafat bukan hanya mengatur cara hidup, tetapi juga cara berpikir, yang berakar kuat dalam identitas bangsa Indonesia. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan tujuan hidup manusia. Dalam konteks Pancasila, aksiologi tercermin dalam nilai-nilai luhur yang dijadikan dasar tindakan etis dan pedoman perilaku kolektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi orientasi hidup bersama yang harus diwujudkan secara nyata dalam kebijakan publik dan dalam praktik kehidupan sosial masyarakat (Wibowo, 2024).

Pancasila tidak sekadar mengatur hubungan antara negara dan warga negara, tetapi juga memberikan arah moral tentang bagaimana manusia seharusnya memperlakukan sesama, lingkungan, dan bangsa. Misalnya, sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sementara sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menggarisbawahi pentingnya distribusi sumber daya dan peluang secara adil sebagai bentuk konkret dari nilai etis.

Pancasila memandang nilai bukan hanya sebagai aturan statis, tetapi sebagai tujuan dinamis yang harus terus diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai tersebut harus diinternalisasi dalam diri

setiap warga negara dan diimplementasikan dalam berbagai kebijakan dan sistem sosial, seperti pendidikan, ekonomi, hukum, dan pemerintahan. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai kompas moral bangsa, yang membimbing arah pembangunan agar tetap manusiawi, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Lebih dari itu, Pancasila sebagai sistem nilai bersifat inklusif dan terbuka terhadap dinamika zaman, namun tetap berakar pada budaya dan jati diri bangsa. Ia memungkinkan adanya dialog antara nilai lokal dan tantangan global, tanpa kehilangan orientasi moralnya. Oleh karena itu, dalam perspektif aksiologis, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi kerangka etika hidup berbangsa, yang menyatukan keberagaman dalam semangat gotong royong dan kemanusiaan yang universal.

## B. Relevansi Pancasila dalam Tantangan Global.

Di tengah derasnya arus globalisasi, liberalisme, dan perkembangan teknologi informasi yang tak terbendung, bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan serius, seperti disintegrasi sosial, krisis identitas nasional, radikalisme ideologis, serta dekadensi moral. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai sistem filsafat tetap menunjukkan relevansinya, karena mengandung nilai-nilai dasar yang bersifat universal namun berakar kuat dalam konteks lokal dan budaya bangsa. Ia bukan sekadar dokumen normatif, tetapi menjadi pedoman hidup dan pijakan ideologis-moral yang dapat menjembatani dinamika global dengan karakter khas keindonesiaan (Yuliana, 2025).

**Tabel 1: Perbandingan Nilai Pancasila dengan Tantangan Global**

Nilai Pancasila	Tantangan Global	Relevansi
Ketuhanan Yang Maha Esa	Radikalisme dan Intoleransi	Menumbuhkan sikap toleransi dan moderasi
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Krisis Lingkungan dan Ilmu Pengetahuan	Mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan dan berkeadilan
Persatuan Indonesia	Globalisasi dan Individualisme	Memperkuat identitas nasional dan semangat gotong royong
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	Krisis Demokrasi	Menjamin partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Ketimpangan Sosial dan Ekonomi	Mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat

Sumber Data: Primer diolah tahun 2025

Nilai Ketuhanan dalam Pancasila tidak hanya menekankan pengakuan terhadap Tuhan, tetapi juga mencerminkan pluralisme dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan. Tantangan global saat ini, khususnya dalam konteks Indonesia, adalah meningkatnya gerakan radikal yang mengklaim

kebenaran tunggal dalam beragama dan cenderung intoleran terhadap keyakinan lain. Hal ini diperparah oleh disinformasi digital dan politisasi agama. Pancasila mendorong moderasi beragama (wasathiyah Islam, toleransi Kristen/Katolik, dan kearifan lokal agama-agama lain). Pendekatan ini sejalan dengan teori pluralisme agama yang dikembangkan oleh John Hick, yang menyatakan bahwa kebenaran teologis dapat ditemukan dalam berbagai tradisi agama.

Kemanusiaan dalam Pancasila tidak bersifat antroposentris semata, tetapi juga menghormati relasi manusia dengan alam. Tantangan seperti krisis iklim, penggundulan hutan, dan eksploitasi sumber daya merupakan akibat dari pendekatan ilmu pengetahuan yang tidak beretika. Nilai kemanusiaan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan berbasis etika lingkungan dan ilmu humanistik, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Jonas melalui teori "Prinsip Tanggung Jawab" (*The Imperative of Responsibility*), yakni manusia harus bertindak seolah-olah keberlangsungan bumi tergantung pada keputusan etisnya.

Persatuan Indonesia terancam oleh fragmentasi identitas akibat arus globalisasi yang membawa nilai individualisme, konsumerisme, dan gaya hidup liberal. Budaya lokal dan rasa kebangsaan mulai terkikis karena masyarakat lebih terkoneksi dengan budaya global daripada nilai tradisional. Pancasila menawarkan semangat komunitarianisme, sebagaimana diungkapkan oleh Charles Taylor, yang menolak atomisasi sosial dan menekankan pentingnya solidaritas dan nilai bersama. Persatuan Indonesia mengajarkan integrasi dalam keberagaman (*Bhinneka Tunggal Ika*), sebuah konsep yang masih sangat relevan untuk memperkuat kohesi sosial.

Krisis demokrasi ditandai oleh menurunnya partisipasi publik, politisasi media, oligarki politik, dan lemahnya proses deliberatif. Demokrasi prosedural kerap menggantikan demokrasi substansial, yang mengedepankan keadilan dan kebaikan bersama. Nilai kerakyatan dalam Pancasila menekankan demokrasi partisipatif, deliberatif, dan kolektif, sebagaimana dirumuskan dalam pemikiran Jurgen Habermas mengenai *public sphere* dan *discursive democracy*. Permusyawaratan bukan sekadar voting, tetapi proses musyawarah untuk mencapai mufakat yang mencerminkan kebijaksanaan kolektif.

Ketimpangan kekayaan dan akses terhadap sumber daya menjadi tantangan besar di era globalisasi. Menurut data BPS 2023, indeks Gini Indonesia berada di angka 0,388, yang menunjukkan ketimpangan masih cukup tinggi. Disparitas pembangunan antara desa dan kota, Jawa dan luar Jawa, memperparah situasi ini. Keadilan sosial dalam Pancasila menekankan distribusi sumber daya yang merata dan kebijakan pro-rakyat. Ini sejalan dengan gagasan John Rawls dalam *Theory of Justice* mengenai prinsip "difference principle" ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan kelompok paling rentan.

**Tabel 2: Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dan Tantangan Global secara Teoritis**

Nilai Pancasila	Tantangan Global	Relevansi & Pendekatan Teoritis
Ketuhanan Yang Maha Esa	Radikalisme dan Intoleransi	Teori Pluralisme Agama (John Hick); Moderasi beragama
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Krisis Lingkungan & Ilmu Pengetahuan	Etika Lingkungan (Hans Jonas); Ilmu Humanistik
Persatuan Indonesia	Globalisasi & Individualisme	Komunitarianisme (Charles Taylor); Kohesi Sosial

Kerakyatan & Permusyawaratan	Krisis Demokrasi	Demokrasi Deliberatif (Jürgen Habermas)
Keadilan Sosial	Ketimpangan Ekonomi	Teori Keadilan Sosial (John Rawls)

Sumber Data: Primer diolah tahun 2025

Pancasila bukan sekadar ideologi nasional, tetapi juga sistem filsafat yang mampu menjawab tantangan global melalui nilai-nilai universal yang relevan. Integrasi antara teori-teori besar filsafat dan nilai-nilai Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki modal ideologis dan moral untuk menjawab persoalan zaman—dari krisis ekologi hingga krisis demokrasi.

Sebagai sistem filsafat, Pancasila tidak menolak modernitas, tetapi mengarahkan dan menyaring pengaruh global agar tetap selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan spiritualitas. Di saat ideologi global seringkali menekankan individualisme ekstrem dan materialisme, Pancasila justru menghadirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, kebebasan dan tanggung jawab, serta kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Dengan demikian, Pancasila mampu menjadi “filter nilai” terhadap penetrasi budaya luar yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.

Dalam dunia pendidikan, penguatan Pancasila sebagai sistem filsafat sangat krusial untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan kebangsaan. Pendidikan yang berbasis Pancasila akan mencetak peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis, tetapi tetap berlandaskan pada nilai-nilai luhur seperti toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Selain itu, dalam tataran kebijakan nasional, Pancasila perlu menjadi dasar dalam perumusan regulasi dan strategi pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi semata.

Dengan kekuatan nilai-nilainya yang bersifat lintas waktu dan ruang, Pancasila tetap relevan sebagai ideologi terbuka yang mampu menjawab tantangan zaman, tanpa kehilangan akar kebudayaan dan identitas bangsanya. Justru di era global yang semakin kompleks, Pancasila dibutuhkan lebih dari sebelumnya, sebagai fondasi untuk menjaga keutuhan bangsa dan membangun masa depan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

## Kesimpulan

Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan fondasi ideologis bangsa Indonesia yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga filosofis. Melalui pendekatan ontologis, Pancasila menunjukkan pandangan tentang hakikat manusia dan realitas sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki dimensi sosial dan moral. Dari sisi epistemologi, Pancasila memuat cara berpikir khas bangsa Indonesia yang menggabungkan rasionalitas, intuisi, pengalaman sejarah, dan nilai budaya. Sementara itu, secara aksiologis, Pancasila mengandung nilai-nilai etis yang menjadi pedoman tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi.

Setiap sila dalam Pancasila membentuk suatu sistem yang integral dan organis, di mana satu sila tidak dapat berdiri sendiri tanpa saling terkait dengan sila lainnya. Hal ini menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar kumpulan nilai, tetapi sebuah sistem filsafat yang menyeluruh dan dinamis. Di tengah tantangan globalisasi dan pergeseran nilai, Pancasila tetap relevan sebagai panduan hidup dan dasar dalam menyusun kebijakan publik yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

## Referensi

- Akurat. (2024, Januari 23). Apa saja yang dihadapi dalam penerapan Pancasila di kehidupan global? Pelajari 10 tantangan berikut. <https://akurat.co>
- Akurat. (2024, Desember 4). Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan global serta bagaimana menghadapi tantangan tersebut? <https://akurat.co>
- Hidayat, A. (2021). *Pancasila Sebagai Sistem Filsafat: Kajian Ontologis dan Epistemologis*. Jakarta: Prenada Media.
- Kompasiana. (2025, Januari 20). *Pendidikan Pancasila di 2025: Menghadapi tantangan dan membangun karakter generasi muda dengan pilar 7 kebiasaan anak Indonesia hebat*. <https://kompasiana.com>
- Kumparan. (2024). *Penerapan Pancasila dalam kehidupan global: Tantangan dan solusi*. Pendidikan Pancasila, 239. <https://kumparan.com>
- Lestari, D. & Maulana, H. (2022). Konsep Nilai dalam Pancasila: Perspektif Filsafat Aksiologi. *Jurnal Filsafat dan Sosial Humaniora*, 8(1), 34-45.
- Muntaza, T. A. (2025, Januari 20). *Pendidikan Pancasila di 2025: Menghadapi tantangan dan membangun karakter generasi muda dengan pilar 7 kebiasaan anak Indonesia hebat*. Kompasiana. <https://kompasiana.com>
- Republika. (2024, April 20). Surahno, S. *Nilai-nilai Pancasila mampu jawab tantangan global*. <https://news.republika.co.id>
- Republika. (2024, April 19). Surahno, S. *Kajian materi Pancasila bagi perguruan tinggi dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)*. <https://news.republika.co.id>
- Rakyat Merdeka. (2024, Januari 29). Suradinata, E. *Perubahan dinamika global: Tantangan dan peluang Indonesia tahun 2025 (Bagian I)*. <https://rm.id>
- Setyadi, Y., & Tim. (2024). *Penerapan Pancasila dalam kehidupan global: Tantangan dan solusi*. Pendidikan Pancasila, 239. <https://kumparan.com>
- Siregar, T. (2023). Filsafat Pancasila dalam Pendidikan Moral Bangsa. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 11(2), 89-101.
- Sugidiyanto, R. (2024, Januari 23). *Apa saja yang dihadapi dalam penerapan Pancasila di kehidupan global? Pelajari 10 tantangan berikut*. <https://akurat.co>
- Sugidiyanto, R. (2024, Desember 4). *Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan global serta bagaimana menghadapi tantangan tersebut?* <https://akurat.co>
- Surahno, S. (2024, April 19). *Kajian materi Pancasila bagi perguruan tinggi dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)*. BPIP. <https://bpip.go.id>
- Surahno, S. (2024, April 20). *Nilai-nilai Pancasila mampu jawab tantangan global*. *Republika Online*. <https://news.republika.co.id>
- Suradinata, E. (2024, Januari 29). *Perubahan dinamika global: Tantangan dan peluang Indonesia tahun 2025 (Bagian I)*. *Rakyat Merdeka*. <https://rm.id>
- Suryaningsi, S., Alim, S., Wingkolatin, W., & Jamil, J. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Wibowo, R. (2024). Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka: Implikasi Filosofis dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 17(3), 150-165.
- Yuliana, M. (2025). *Reaktualisasi Pancasila dalam Perspektif Filsafat Modern*. Yogyakarta: Deepublish.

